



**ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HAMBATAN
DALAM PROSES PEMBANGUNAN DESA
(Studi Kasus Desa Kalabeso, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa,
2025–2026)**

Aji Portuna

ajia24424@gmail.com

Universitas Teknologi Sumbawa

ABSTRAK

Partisipasi masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan desa, namun di Desa Kalabeso, Kecamatan Buer, tingkat partisipasi tersebut belum berjalan optimal. Warga banyak terlibat pada tahap pelaksanaan fisik (gotong royong), sementara keterlibatan dalam perencanaan (Musrenbangdes) dan evaluasi masih bersifat simbolik, terutama bagi perempuan dan pemuda. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam dengan tujuh kelompok narasumber, observasi, dan kajian dokumen, yang dianalisis menggunakan teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons dengan skema AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency). Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi Integrasi berjalan paling baik karena ditopang nilai gotong royong dan ajaran Islam. Fungsi Adaptasi dan Pencapaian Tujuan tergolong cukup baik, dengan realisasi 80% target RPJMDes, meskipun aspirasi perempuan dan pemuda belum sepenuhnya terakomodasi. Fungsi Pemeliharaan Pola merupakan fungsi yang paling terancam akibat pergeseran nilai generasi muda ke arah individualistik dan ketergantungan pada bantuan sosial instan. Hambatan utama partisipasi meliputi orientasi manfaat jangka pendek, tekanan ekonomi sektor pertanian, norma gender, serta kebiasaan menyalurkan aspirasi melalui RT/RW. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan pembangunan yang lebih inklusif, berbasis kearifan lokal, dan berkeadilan gender untuk memperkuat partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Desa, Hambatan Partisipasi, Fungsionalisme Struktural, Skema AGIL.

ABSTRACT

Community participation is a key determinant of successful village development, yet in Kalabeso Village, Buer District, participation remains suboptimal. Residents are mostly involved in physical implementation (mutual cooperation), while involvement in planning (Musrenbangdes) and evaluation remains largely symbolic, especially among women and youth. This study describes the forms and levels of community participation and identifies its barriers using a qualitative descriptive approach, with in-depth interviews of seven informant groups, field observation, and document review, analyzed through Talcott Parsons' Structural Functionalism and the AGIL scheme (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency). Results show that the Integration function works best, sustained by mutual-cooperation values and Islamic teachings. Adaptation and Goal Attainment perform fairly well, with 80% of RPJMDes targets achieved, though women's and youth's aspirations remain under-represented. The Latency function faces the greatest threat from the younger generation's shift toward individualism and dependence on instant social aid. Main barriers include short-term benefit orientation, agricultural economic pressure, gender norms, and reliance

on RT/RW intermediaries. An inclusive, locally grounded, and gender-equitable development approach is needed to strengthen participation.

Keywords: *Community Participation, Village Development, Participation Barriers, Structural Functionalism, AGIL Scheme.*

PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan berkelanjutan sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap tahap prosesnya. Partisipasi bukan sekadar kehadiran fisik, melainkan keterlibatan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. UNDP (2023) menegaskan bahwa pembangunan berbasis partisipasi masyarakat terbukti meningkatkan efektivitas program sosial dan memperkuat rasa kepemilikan warga terhadap hasil pembangunan, sekaligus menjadi koreksi terhadap paradigma top-down yang kerap gagal mengakomodasi kebutuhan lokal. Partisipasi masyarakat dengan demikian bukan hanya instrumen teknis pembangunan, melainkan wujud nyata demokratisasi sosial yang menempatkan warga sebagai aktor utama perubahan.

Heri & Supardal (2024) menunjukkan bahwa meskipun perangkat regulasi telah mendukung partisipasi, keterlibatan masyarakat masih sangat bergantung pada kapasitas kepemimpinan desa, tingkat pendidikan warga, dan kekuatan budaya gotong royong. Ulber Silalahi (2022) menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan desa berkaitan erat dengan kemampuan kepala desa memotivasi masyarakat dan membangun komunikasi dua arah, sementara gaya kepemimpinan yang top-down membuat forum musyawarah desa cenderung berubah menjadi formalitas administratif belaka.

Desa Kalabeso, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa menghadapi tantangan klasik berupa keterbatasan akses pendidikan, lapangan kerja, dan fasilitas publik. Berdasarkan data BPS Kecamatan Buer Dalam Angka (2024), Desa Kalabeso berpenduduk 1.641 jiwa atau 8,95% dari total penduduk Kecamatan Buer, dengan kepadatan 31,92 jiwa/km² pada wilayah seluas sekitar 48,15 km², menjadikannya salah satu desa terluas di kecamatan tersebut. Mayoritas warga bermata pencaharian di sektor pertanian subsisten sehingga lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan ekonomi harian dibandingkan partisipasi jangka panjang (Samaun et al., 2022).

Partisipasi warga tampak dalam forum Musrenbangdes dan gotong royong pembangunan infrastruktur jalan, namun cenderung bersifat simbolik dan terbatas pada tahap pelaksanaan fisik tanpa keterlibatan berarti dalam perencanaan dan evaluasi. Darin et al. (2022) menemukan bahwa kehadiran warga dalam forum Musrenbang sering didorong kewajiban formal, bukan kesadaran kritis terhadap arah pembangunan, sehingga hasil musyawarah tidak selalu mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.

Dari sisi sosial-budaya, nilai gotong royong dan solidaritas menjadi fondasi penting pembangunan partisipatif, tetapi norma hierarki adat kerap menghambat keterbukaan bersuara, terutama bagi perempuan dan pemuda. Harfis et al. (2019) menemukan bahwa perempuan di pedesaan menghadapi hambatan struktural akibat peran domestik dan rendahnya pendidikan. Penelitian-penelitian terdahulu (Heri, 2024; Silalahi, 2023; Samaun et al., 2022; Darin et al., 2022; Harfis et al., 2019; Apriyani & Arif, 2019; Mulya Lestari & Eko Wahyuningsih, 2021) umumnya masih bersifat normatif dan berskala makro, serta belum menelusuri secara kontekstual bagaimana interaksi sosial, pola komunikasi, dan relasi kekuasaan lokal membentuk pola partisipasi, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur seperti Sumbawa. Kesenjangan penelitian (research gap) inilah yang mendasari perlunya kajian kualitatif-kontekstual pada level satu desa.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua pertanyaan: (1) apa saja faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Desa Kalabeso; dan (2) bagaimana bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa tersebut. Penelitian bertujuan mengidentifikasi hambatan partisipasi sekaligus mendeskripsikan bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat pada tiga tahap pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi), dengan manfaat teoretis memperkaya kajian sosiologi pembangunan berbasis lokalitas Sumbawa dan manfaat praktis sebagai masukan bagi pemerintah desa dan masyarakat dalam merancang kebijakan pembangunan yang lebih partisipatif dan responsif gender.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di berbagai wilayah Indonesia. Heri (2024) menyoroti pengaruh kepemimpinan, pendidikan, dan gotong royong terhadap partisipasi, namun bersifat deskriptif umum dan belum mendalami konteks lokal tertentu. Silalahi (2023) menitikberatkan pada gaya kepemimpinan desa di Sumatera tanpa menelusuri nilai sosial-budaya secara mendalam. Samaun et al. (2022) menyoroti peran pemerintah Desa Oluhuta, Gorontalo Utara, dalam mendorong partisipasi melalui sosialisasi, dengan hambatan berupa faktor ekonomi dan rendahnya motivasi warga. Darin et al. (2022) menemukan bahwa partisipasi dalam Musrenbang di Gorontalo sering bersifat formalitas dan didominasi aparat desa. Harfis et al. (2019) mengidentifikasi hambatan pendidikan, ketimpangan gender, dan lemahnya komunikasi di Sumatera Barat. Apriyani & Arif (2019) serta Mulya Lestari & Eko Wahyuningsih (2021) masing-masing menemukan bahwa partisipasi warga di Desa Toyareka dan dalam penyusunan RKPDes belum berjalan maksimal, khususnya pada tahap perencanaan dan pengawasan.

Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut yang bersifat normatif dan berskala luas, penelitian ini memusatkan perhatian pada satu konteks lokal Desa Kalabeso dengan menelaah secara mendalam hubungan sosial, norma budaya, relasi gender, dan persepsi warga sebagai faktor pembentuk perilaku partisipatif, sekaligus menggunakan kerangka teori fungsionalisme struktural yang belum banyak digunakan dalam kajian sejenis di wilayah Sumbawa.

Fungsionalisme Struktural dan Skema AGIL

Talcott Parsons memandang masyarakat sebagai sistem sosial yang kompleks dan saling bergantung, di mana setiap bagian memiliki fungsi yang berkontribusi terhadap stabilitas sistem secara keseluruhan (Parsons, 1951; Soekanto, 1986). Untuk menjelaskan hal ini, Parsons mengembangkan skema AGIL yang terdiri atas empat fungsi esensial suatu sistem sosial: Adaptation (A) kemampuan sistem menyesuaikan diri dan mengelola sumber daya terhadap lingkungan eksternal; Goal Attainment (G) kemampuan menetapkan tujuan bersama dan mengarahkan sumber daya untuk mencapainya; Integration (I) fungsi menjaga kohesi dan koordinasi antarsubsistem agar tidak terjadi disorganisasi sosial; serta Latency atau pattern maintenance (L) pemeliharaan nilai, norma, dan motivasi yang menjadi dasar legitimasi sosial.

Parsons menegaskan bahwa keempat fungsi tersebut bersifat komplementer; melemahnya satu fungsi akan berdampak sistemik pada fungsi lainnya dan berpotensi memunculkan disfungsi sosial. Dalam konteks partisipasi pembangunan desa, fungsi Integrasi menjadi titik analisis utama karena keterlibatan warga dalam setiap tahap pembangunan menjaga kohesi sosial dan koordinasi antara masyarakat dan pemerintah desa, sementara hambatan partisipasi seperti dominasi elite lokal atau lemahnya kepercayaan wargamenjad i indikator disfungsi pada subsistem sosial dan politik desa. Kerangka AGIL dengan demikian relevan digunakan sebagai grand theory untuk

menganalisis bagaimana struktur sosial, nilai budaya, dan tingkat partisipasi saling berkaitan di Desa Kalabeso.

Pembangunan Partisipatif

Pembangunan partisipatif menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif, bukan sekadar objek pembangunan, dan menegaskan peralihan dari model top-down menuju bottom-up yang inklusif (Chambers, 1997; Friedmann, 1992). Pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) yang dikembangkan Chambers (1997) menekankan bahwa masyarakat harus diberdayakan untuk menentukan prioritas pembangunannya sendiri, sehingga partisipasi bukan sekadar formalitas melainkan instrumen pemberdayaan sosial. Studi Rayyani et al. (2024) turut menunjukkan bahwa pembangunan partisipatif memperkuat rasa kepemilikan masyarakat dan kepercayaan sosial terhadap pemerintah lokal di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam dinamika partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Kalabeso serta faktor-faktor yang menghambatnya. Lokasi penelitian dipilih secara purposive di Desa Kalabeso, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, dengan pertimbangan tingkat partisipasi yang fluktuatif, jumlah penduduk terbanyak di kecamatan, serta karakteristik sosial-ekonomi agraris yang kental dengan nilai gotong royong dan hierarki adat.

Subjek penelitian ditentukan melalui purposive sampling yang mencakup tujuh kelompok narasumber, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh masyarakat, dan tokoh adat, dengan total 14 informan. Objek penelitian meliputi bentuk partisipasi masyarakat, hambatan sosial-ekonomi-budaya, serta relasi antara pemerintah desa dan warga dalam proses pembangunan. Sumber data terdiri atas data primer (wawancara mendalam dan observasi lapangan) serta data sekunder (dokumen RPJMDes, APBDes, data BPS Kecamatan Buer Dalam Angka, dan literatur ilmiah pendukung) (Sugiyono, 2017).

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengelompokkan data ke dalam kategori, menguraikannya menjadi unit-unit informasi, mensintesis temuan, dan menyusun pola sesuai kerangka teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons melalui skema AGIL. Keempat dimensi tersebut digunakan sebagai lensa analisis untuk menilai sejauh mana sistem sosial desa menjalankan fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola nilai partisipatif, tanpa menggunakan perhitungan statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Kalabeso

Desa Kalabeso berpenduduk 1.641 jiwa (786 laki-laki dan 855 perempuan) dengan 540 kepala keluarga, seluruhnya beragama Islam dan didominasi etnis Samawa. Mata pencaharian utama warga adalah petani (322 laki-laki dan 554 perempuan), diikuti peternak (155 orang) dan buruh tani, mencerminkan ekonomi agraris subsisten yang memengaruhi ketersediaan waktu warga untuk berpartisipasi dalam forum pembangunan. Pemerintahan desa dijalankan oleh Kepala Desa dan 11 perangkat desa yang terbagi ke dalam tiga dusun (Dusun Atas, Tengah, dan Bawah). Fasilitas pendidikan desa mencakup PAUD, TK, SD, dan SMP, sementara jenjang SMA/SMK belum tersedia di dalam desa.

Tabel 1 Ringkasan Fungsi AGIL Partisipasi Masyarakat Desa Kalabeso

Fungsi AGIL	Kondisi Empiris	Faktor Kunci
Adaptation	Sosialisasi berjalan baik; perempuan & warga berpendidikan rendah masih terhambat	Jejaring RT/RW-LKD; beban ganda perempuan
Goal Attainment	Realisasi 80% target RPJMDes; aspirasi perempuan & pemuda belum terakomodasi penuh	Musrenbangdes berjenjang; legitimasi tokoh adat-agama
Integration	Fungsi paling harmonis; koordinasi lintas lembaga berjalan baik	Gotong royong; nilai ta'awun & ukhuwah
Latency	Fungsi paling lemah; nilai kolektif tergeser individualisme generasi muda	Ketergantungan bantuan sosial instan; budaya digital

Sumber: Hasil Wawancara dan Dokumen Desa, Diolah (2026).

Adaptation (Adaptasi)

Fungsi adaptasi berjalan relatif baik melalui mekanisme sosialisasi formal yang transparan dari pemerintah desa lewat jaringan RT/RW dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Kepala Desa menegaskan bahwa perencanaan yang matang dan sosialisasi anggaran secara terbuka dimulai dari RKPDes hingga APBDDes, dilengkapi pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang melibatkan tokoh adat, agama, pemuda, dan perempuan agar adaptasi berjalan inklusif. Sekretaris Desa menambahkan bahwa penyebaran informasi jadwal Musrenbangdes melalui RT/RW dan penyederhanaan bahan sosialisasi menjadi strategi penting agar warga dapat berpartisipasi secara bermakna.

Modal sosial berupa musyawarah, gotong royong, dan nilai keagamaan turut mendorong penerimaan warga terhadap program pembangunan baru. Tokoh agama menegaskan bahwa membangun desa dipandang sebagai bagian dari amal jariyah, sementara tokoh adat menekankan pentingnya dialog dengan pemerintah desa sebelum program baru dilaksanakan agar tidak berbenturan dengan nilai adat. Karang taruna, melalui tokoh pemuda, menunjukkan adaptasi yang lebih cepat terhadap program baru dan memanfaatkan media sosial sebagai saluran informasi kepada warga muda lainnya.

Meski demikian, ditemukan disfungsi parsial pada kelompok perempuan yang menanggung beban ganda antara pekerjaan domestik dan pertanian sekaligus rasa kurang percaya diri berbicara dalam forum yang didominasi laki-laki, serta pada kelompok berpendidikan rendah yang kesulitan memahami prosedur administratif Musrenbangdes. Kondisi ini menunjukkan bahwa subsistem sosial dan budaya belum sepenuhnya mendukung fungsi adaptasi secara merata di seluruh lapisan masyarakat, sehingga pemerintah desa perlu merancang strategi sosialisasi yang lebih kontekstual dan responsif gender.

Goal Attainment (Pencapaian Tujuan)

Fungsi pencapaian tujuan tercermin dari realisasi pembangunan yang mencapai 80% dari target RPJMDes. Perumusan tujuan berjalan berjenjang melalui pengumpulan usulan di tingkat RT/RW yang dibawa ke forum Musrenbangdes, sehingga aspirasi warga terwakili secara representatif meski Sekretaris Desa mengakui masih perlu mendorong lebih banyak warga hadir langsung, bukan hanya diwakili tokoh masyarakat. Keterlibatan tokoh agama

dan tokoh adat dalam Tim Pelaksana Kegiatan memberikan legitimasi sosial yang kuat terhadap prioritas pembangunan, khususnya pada infrastruktur pertanian yang dipandang mencerminkan kemaslahatan dan keadilan bagi mayoritas petani.

Namun, inklusivitas penetapan tujuan masih menjadi kelemahan. Tokoh perempuan menyampaikan bahwa aspirasi perempuan sudah mulai didengar melalui forum PKK dan Posyandu, tetapi kebutuhan spesifik seperti fasilitas kesehatan ibu-anak dan pelatihan keterampilan belum sepenuhnya terakomodasi. Tokoh pemuda menyampaikan harapan serupa agar program kewirausahaan, digitalisasi desa, dan fasilitas olahraga mendapat prioritas yang lebih spesifik. Disfungsi pada subsistem politik ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan jangka panjang dan melemahkan legitimasi program pembangunan bila tidak segera diperbaiki melalui mekanisme musyawarah yang lebih inklusif.

Integration (Integrasi)

Fungsi integrasi merupakan fungsi yang berjalan paling harmonis di antara keempat fungsi AGIL. Koordinasi lintas kelembagaan seperti PKK, karang taruna, lembaga adat, dan BPD dengan pemerintah desa berlangsung rutin melalui forum LKD, didukung kepemimpinan kepala desa yang terbuka dan transparan dalam pengelolaan anggaran sehingga menumbuhkan kepercayaan sosial antarwarga. Tokoh masyarakat menegaskan bahwa hubungan yang mudah diakses antara aparat desa dan warga biasa membuat masyarakat merasa tidak ada yang disembunyikan dalam pengelolaan pembangunan.

Nilai gotong royong dalam tradisi adat Kalabeso, yang diperkuat konsep ta'awun (tolong-menolong) dan ukhuwah (persaudaraan) dalam ajaran Islam, menjadi fondasi kultural integrasi sosial yang sangat kuat tokoh adat bahkan menyatakan bahwa gotong royong telah menjadi kewajiban sosial sehingga warga yang tidak terlibat kegiatan bersama dapat merasa kurang diterima dalam komunitas. Kelemahan yang masih teridentifikasi adalah koordinasi antara karang taruna dan pemerintah desa yang belum terlembagakan secara formal, sehingga konsistensi keterlibatan pemuda masih bergantung pada inisiatif personal, bukan pada sistem pertemuan terjadwal yang berkelanjutan.

Latency (Pemeliharaan Pola)

Fungsi pemeliharaan pola berada pada kondisi paling kritis di antara keempat fungsi AGIL. Kombinasi mekanisme formal (Musrenbangdes tahunan) dan informal (tradisi sedekah orong, pengajian, majelis taklim) masih cukup efektif menjaga nilai partisipatif, dengan lembaga keagamaan berperan strategis mewariskan kesadaran partisipatif melalui madrasah, TPQ, dan remaja masjid sebagai wahana latihan berkontribusi bagi desa. Tokoh adat turut menegaskan bahwa nilai gotong royong, musyawarah, dan sarei (saling menghormati) masih menjadi identitas kuat masyarakat Kalabeso.

Akan tetapi, Sekretaris Desa, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda secara konsisten mengonfirmasi adanya pergeseran nilai generasi muda ke arah individualistis, yang dipicu budaya digital dan ketergantungan pada program bantuan sosial instan seperti BLT dan PKH yang melemahkan etos kerja bersama. Kepala Desa merespons tantangan ini dengan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja sebagai alternatif ketergantungan pada bantuan instan. Dalam perspektif Parsons, melemahnya fungsi latency berpotensi berdampak berantai pada ketiga fungsi AGIL lainnya, sehingga penguatan kemandirian ekonomi dan reinterpretasi nilai gotong royong yang relevan bagi generasi muda menjadi prioritas mendesak bagi keberlanjutan sistem partisipasi di Desa Kalabeso.

Pembahasan Umum

Secara keseluruhan, keempat fungsi AGIL menunjukkan pola yang tidak seimbang sebagaimana dirangkum pada Tabel 1: Integrasi berjalan paling optimal karena ditopang modal sosial dan nilai religius; Adaptasi dan Pencapaian Tujuan tergolong cukup baik

namun belum sepenuhnya inklusif gender dan generasi; sedangkan Pemeliharaan Pola menjadi titik paling rentan akibat transformasi nilai antar-generasi. Temuan ini memperkuat argumen Parsons (1951) bahwa keempat fungsi bersifat komplementer melemahnya satu fungsi akan berdampak sistemik terhadap fungsi lainnya.

Hambatan partisipasi di Desa Kalabeso pada dasarnya bersifat multidimensi: dimensi ekonomi berupa orientasi manfaat jangka pendek akibat tekanan sektor pertanian subsisten (Samaun et al., 2022); dimensi sosial-budaya berupa norma gender dan hierarki adat yang membatasi ruang bicara perempuan dan pemuda (Harfis et al., 2019); serta dimensi struktural berupa ketergantungan pada mekanisme perwakilan RT/RW yang belum tentu menyalurkan aspirasi warga secara utuh (Darin et al., 2022). Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu, namun memberikan kontribusi baru berupa penjelasan mengapa fungsi Integrasi dapat tetap kuat di tengah lemahnya fungsi lain, yaitu karena modal sosial keagamaan dan adat mampu menjadi 'jangkar' kohesi sosial meskipun inklusivitas kebijakan (Goal Attainment) dan regenerasi nilai (Latency) masih menghadapi tantangan struktural.

KESIMPULAN

Bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat Desa Kalabeso masih belum optimal. Partisipasi lebih banyak terwujud pada tahap pelaksanaan fisik pembangunan (gotong royong, pembangunan jalan), sementara keterlibatan pada tahap perencanaan dan evaluasi masih bersifat simbolik dan formalitas. Ditinjau dari skema AGIL, fungsi Integrasi berjalan paling harmonis berkat nilai gotong royong dan ajaran Islam; fungsi Adaptasi dan Pencapaian Tujuan cukup baik dengan realisasi 80% target RPJMDes; sedangkan fungsi Pemeliharaan Pola paling terancam akibat pergeseran nilai generasi muda ke arah individualistik dan ketergantungan pada bantuan sosial instan.

Hambatan utama partisipasi meliputi keterbatasan ekonomi rumah tangga petani, rendahnya pendidikan dan pemahaman warga atas hak partisipatif, keterbatasan waktu akibat kesibukan bertani, norma gender dan hierarki adat yang membatasi ruang bicara perempuan dan pemuda, serta minimnya transparansi komunikasi dua arah antara pemerintah desa dan warga. Modal sosial berupa gotong royong dan solidaritas tetap menjadi kekuatan utama yang perlu terus dipelihara dan direvitalisasi dalam bentuk yang relevan bagi generasi muda.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah desa memperkuat inklusivitas mekanisme Musrenbangdes dengan penjadwalan yang tidak berbenturan dengan jam kerja pertanian, memformalkan koordinasi dengan karang taruna melalui agenda pertemuan rutin, mengembangkan program penguatan kapasitas perempuan, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui BUMDes sebagai alternatif atas ketergantungan pada bantuan sosial instan. Tokoh adat dan agama disarankan berperan lebih aktif mendorong partisipasi inklusif serta reinterpretasi nilai adat yang lebih ramah gender. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan participatory action research, studi komparatif lintas desa, atau kajian dampak digitalisasi terhadap partisipasi untuk memperdalam pemahaman tentang dinamika partisipasi di wilayah Indonesia bagian timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Adon Nasrullah Jamaludin. (2016). *Sosiologi Pembangunan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Apriyani, L., & Arif, D. B. (2019). Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa Toyareka Kecamatan Kemangkong Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah. *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(2), 61. <https://doi.org/10.12928/citizenship.v2i2.17991>
- Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. London: Intermediate Technology Publications.

- Darin, D., Moonti, U., & Dai, S. I. S. (2022). Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa. Gorontalo.
- Friedmann, J. (1992). *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Oxford: Blackwell.
- Harfis, H., Sopyan, S., & Afrizal, D. (2019). Faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. *Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis*, 1(2), 30–37. <https://doi.org/10.36917/japabis.v1i2.20>
- Heri, A., & Supardal. (2024). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(3), 1376–1388. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i3.685>
- Mulya Lestari, S., & Eko Wahyuningsih, Y. (2021). Partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). *Jurnal Sosial dan Sains*, 1(10), 1254–1261. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i10.235>
- Parsons, T. (1951). *The Social System*. New York: The Free Press.
- Rahman, K. (2015). Pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. *Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 1(2), 189–199.
- Rayyani, R., Hasyim, M., & Kurniawan, A. (2024). Pembangunan partisipatif dan kepercayaan sosial terhadap pemerintah lokal di Indonesia. *Journal of Indonesian Social Development and Policy (JISDP)*, 6(1), 33–50.
- Riyanto, A., & Kovalenko, I. (2023). Community participation and welfare state transformation in rural Indonesia. *Asian Journal of Social Policy*, 19(2), 201–218.
- Samaun, R., Bakri, B., & Mediansyah, A. R. (2022). Upaya pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 1(1), 18–33. <https://doi.org/10.59713/jipik.v1i1.18>
- Silalahi, U. (2023). Kepemimpinan pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. *Studi deskriptif kualitatif di beberapa desa di Sumatera*.
- Soekanto, S. (1986). *Talcott Parsons: Fungsionalisme Impretif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Ulber Silalahi. (2022). *Kepemimpinan Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa*. Yogyakarta: Uwais Inspirasi Indonesia.
- United Nations Development Programme. (2023). *Human Development Report 2023/2024: Breaking the Gridlock: Reimagining Cooperation in a Polarized World*. New York: UNDP. <https://hdr.undp.org>
- Wulansari, D. (2015). Peran masyarakat dalam penyusunan RPJMDes sebagai wujud otonomi desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(2), 112–125.